

BAB I

PENDAHULUAN

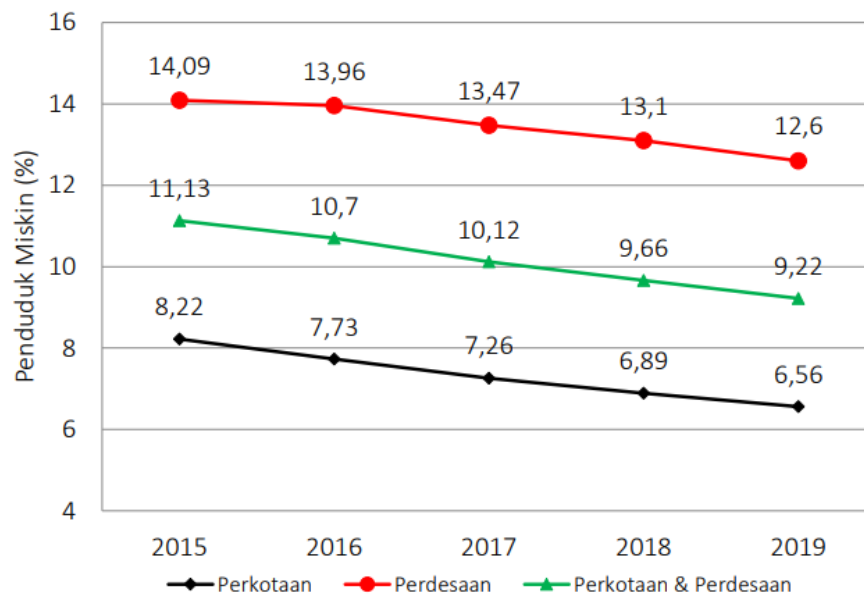
A. Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara Indonesia yang adil dan makmur, kehadiran negara dibutuhkan untuk melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk secara berkelanjutan dengan berlandaskan kemampuan nasional, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan nasional menjadi hal yang sangat penting guna mengukur keberhasilan suatu negara. Namun, pada kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan belum cukup efisien dan belum dilakukan secara merata, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi. Kemiskinan sebagai kondisi dimana individu atau kelompok individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup dan berkembang untuk lebih sejahtera. Hak-hak dasar tersebut adalah pemenuhan kebutuhan pangan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan World Bank pada tahun 2000 pada prinsipnya, kemiskinan adalah sebuah fenomena atau proses multidimensi,

yang berarti bahwa hal ini disebabkan oleh banyak faktor.

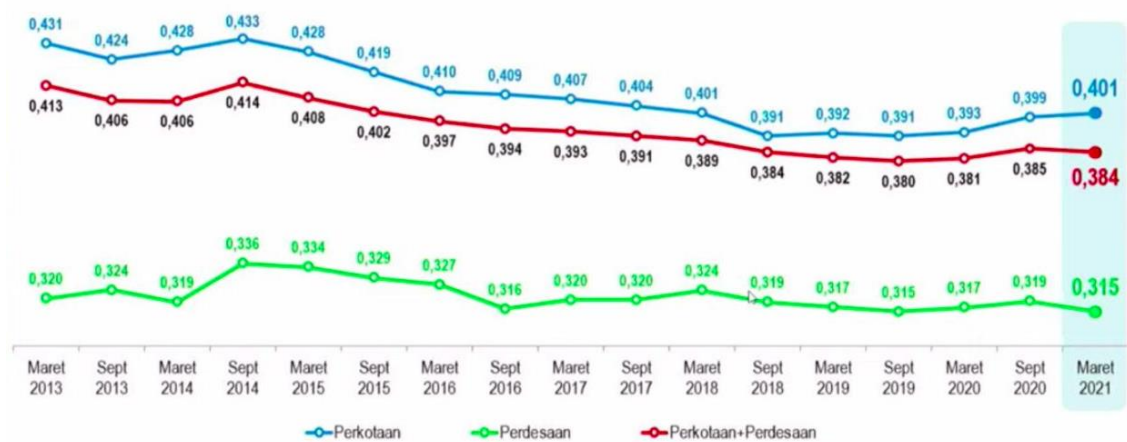
Namun, di Indonesia kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang sangat erat kaitannya dengan sosial ekonomi kondisi perdesaan dan sektor pertanian (Yacoub & Mutiaradina, 2020). Selain itu, aksesibilitas menuju layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan juga mahal, karena sebagian besar orang miskin ini bertempat tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan menunjukkan angka yang relatif tinggi, pada tahun 2019 tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 6,56% sedangkan di perdesaan mencapai 12,6%.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1. 1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Desa dan Kota di Indonesia

Tingginya kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia kelompok kaya semakin kaya, sedangkan kelompok miskin kian miskin. Tingkat ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia penting untuk diperhatikan. Ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti jaringan listrik dan jalan berkualitas, semakin memperlebar ketimpangan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 2 Tren Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan

Ketimpangan di perkotaan dan perdesaan ditunjukkan melalui Koefisien Gini. Koefisien Gini (*gini ratio*) perdesaan pada tahun 2015-2019 cenderung turun, namun pada tahun 2020-2021 cenderung mengalami kenaikan seperti terlihat pada gambar 1.2. Kesenjangan yang tercermin dari nilai koefisien gini ini masih harus terus diturunkan, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan kerja dan perluasan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi di daerah-daerah terpencil.

Dalam mengatasi kemiskinan, penurunan ketimpangan menjadi upaya yang sangat penting (Warda et al., 2019). Mengingat kemiskinan di Indonesia identik

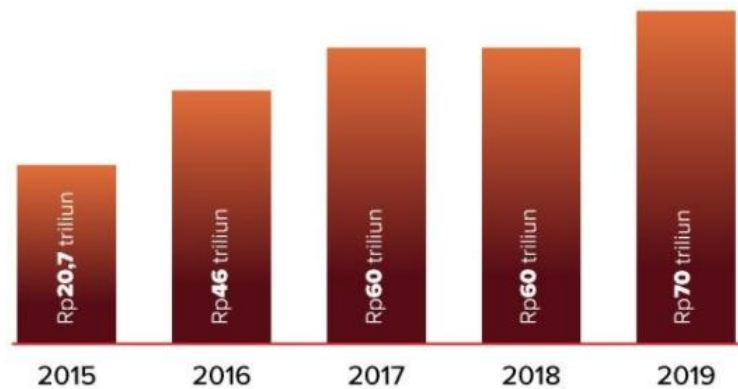
dengan wilayah perdesaan, maka upaya penurunan ketimpangan di wilayah perdesaan akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan nasional. Saat ini, pemerintah sedang melakukan berbagai upaya dalam program pembangunan dan pemberdayaan di perdesaan. Salah satu program yang terbesar adalah Kebijakan Dana Desa. Berdasarkan kategori wilayah desa dalam Potensi Desa (Podes), status desa-desa di Indonesia terbagi ke dalam desa perkotaan dan desa perdesaan. Menurut BPS tahun 2020, terdapat sekitar 83.897 desa di Indonesia, 64,69% diantaranya termasuk dalam kategori desa perdesaan yaitu berjumlah sekitar 54.297 desa, dan 35,31% termasuk dalam kategori desa perkotaan yaitu berjumlah sekitar 29.600 desa.

Perdesaan merupakan salah satu sektor penting untuk dimajukan agar masyarakat desa tidak tertinggal dari masyarakat di perkotaan. UU Desa No. 6 Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap desa yang menjelaskan fungsi dan kewenangan desa. Desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Pembangunan yang dimulai dari desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sehingga nantinya masyarakat memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah pusat.

Sejak tahun 2015, Dana Desa disalurkan dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Dana desa diperuntukkan

bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya yaitu guna mengentaskan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan pembangunan (Kemenkeu, 2017). Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan perdesaan dengan pemerintahan terkecilnya berupa desa. Adanya kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada tingkat desa yang juga diikuti dengan transfer fiskal (Dana Desa) diharapkan dapat menjadi faktor penggerak perekonomian desa, dengan demikian dana alokasi desa akan semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data kementerian keuangan, dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dana desa yang dikeluarkan pemerintah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pentingnya percepatan pembangunan perdesaan yang menjadi prioritas pemerintah. Diharapkan dengan peningkatan anggaran dana desa, masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya sekaligus meningkatkan kualitas untuk kemajuan masyarakat desa agar semakin baik.



Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2019

Gambar 1. 3 Anggaran Dana Desa

Besarnya dana desa yang disalurkan dari tahun 2015 hingga saat ini perlu dikaji karena masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dibandingkan perkotaan. Selain itu, perlu diketahui apakah dengan adanya transfer dana desa dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah desa-kota dan apakah terdapat perbedaan kondisi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di wilayah desa-kota sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al Hasyr' ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (*QS al Hasyr’ ayat 7*).

Berdasarkan ayat di atas, Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat.

Maka berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dimana terdapat kondisi ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan meskipun sudah digulirkannya dana desa guna menunjang pembangunan pada wilayah perdesaan, oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah masalah ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di wilayah desa-kota dengan mengangkat judul **“Analisis Perbedaan Kondisi Ketimpangan dan Kemiskinan Desa-Kota Sebelum dan Sesudah Digulirkannya Dana Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut ini:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan dan kemiskinan di wilayah desa-kota sebelum digulirkannya dana desa?
2. Bagaimana kondisi ketimpangan dan kemiskinan di wilayah desa-kota sesudah digulirkannya dana desa?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di wilayah desa-kota yang diwakili *rasio gini* sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui kondisi ketimpangan dan kemiskinan di wilayah desa-kota sebelum digulirkannya dana desa.
2. Untuk mengetahui kondisi ketimpangan dan kemiskinan di wilayah desa-kota sesudah digulirkannya dana desa.
3. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang diwakili *rasio gini* di wilayah desa-kota sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis seperti berikut ini :

- a. Dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian ruang lingkup yang sama.
- b. Sebagai bahan informasi tambahan mengenai kondisi ketimpangan dan kemiskinan perdesaan sebelum dan sesudah digulikannya dana desa.

2. Manfaat Praktis

Pemerintah dapat mempertimbangkan penelitian ini sebagai acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berhubungan pada pembangunan desa guna mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.